

# RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN [RPP]

Oleh Sutarjo Adisusilo, J.R., M.Pd.

## 1. Pendahuluan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran [RPP] adalah bagian utuh dari sebuah kurikulum yang harus dibuat oleh guru. Dalam kurikulum 1994 dikenal adanya Satuan Acuan Pembelajaran [SAP], suatu rencana mengajar yang sarat dengan uraian materi. Dalam KTSP rencana pembelajaran tetap ada tetapi orientasi dan modelnya berbeda dengan SAP. Orientasi rencana pembelajaran dalam KTSP adalah tercapainya kompetensi dasar siswa sebagaimana dirumuskan dalam kurikulum, maka dalam RPP guru membuat rencana rinci bagaimana proses pembelajaran dapat mencapai tujuan [kompetensi dasar].

### a. Landasan dan pengertian RPP

#### Landasan RPP

Landasan RPP adalah PP no 19 tahun 2005 pasal 20.

Di dalam PP no 19 tahun 2005 pasal 20 dikatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan *rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.*

#### Pengertian RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran [RPP] adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Maka ringkasnya **RPP adalah rencana operasional kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa KD dalam setiap tatap muka di kelas. Lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) Kompetensi Dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih.**

RPP harus berupa kegiatan konkret setapak demi setapak yang dilakukan oleh guru di kelas dalam mendampingi peserta didik. Satu hal yang amat penting dalam penyusunan RPP adalah bahwa kegiatan pembelajaran harus diarahkan agar berfokus pada peserta didik, sedangkan guru berperan sebagai pendamping, fasilitator. Artinya, ketika guru memilih pendekatan, metode, materi, pengalaman belajar, interaksi belajar mengajar harus memungkinkan peserta didik berinteraksi dan aktif, sedang guru memfasilitasi dan mendampinginya.

### **Komponen RPP (minimal) yang harus dikembangkan:**

- 1) Tujuan pembelajaran;
- 2) Materi dan sumber pembelajaran;
- 3) Metode dan media pembelajaran;
- 4) Skenario pembelajaran; dan
- 5) Penilaian hasil belajar.

Komponen dalam RPP lebih kompleks daripada komponen untuk membuat SAP. Komponen untuk membuat RPP adalah pendalaman atas :

- 1) Standar Kompetensi;
- 2) Kompetensi Dasar;
- 3) Indikator;
- 4) Tujuan pembelajaran;
- 5) Materi pokok; dan sumber belajar.
- 6) Metode dan Bahan/alat/media;
- 7) Skenario pembelajaran; dan
- 8) Evaluasi.

Di samping hal-hal tersebut guru harus memperhatikan pendekatan pembelajarannya yang cocok dengan kompetensi, sarana prasarana dan kondisi siswa. RPP adalah "kurikulum" guru, yang dibuat guru sesuai dengan kebutuhan, realitas dan fasilitas sekolah dan keadaan riil para siswanya. Panjang pendeknya, banyak sedikitnya indikator, panjang pendeknya materi dan waktu yang dibutuhkan, metode, media, langkah pembelajaran sepenuhnya ditentukan oleh guru. RPP merupakan rencana garis besar pembelajaran yang operasional dan fleksibel karena tidak harus dilaksanakan oleh sang perancangannya, artinya dalam situasi darurat guru lain dapat melaksanakan RPP yang dibuat oleh guru tertentu.

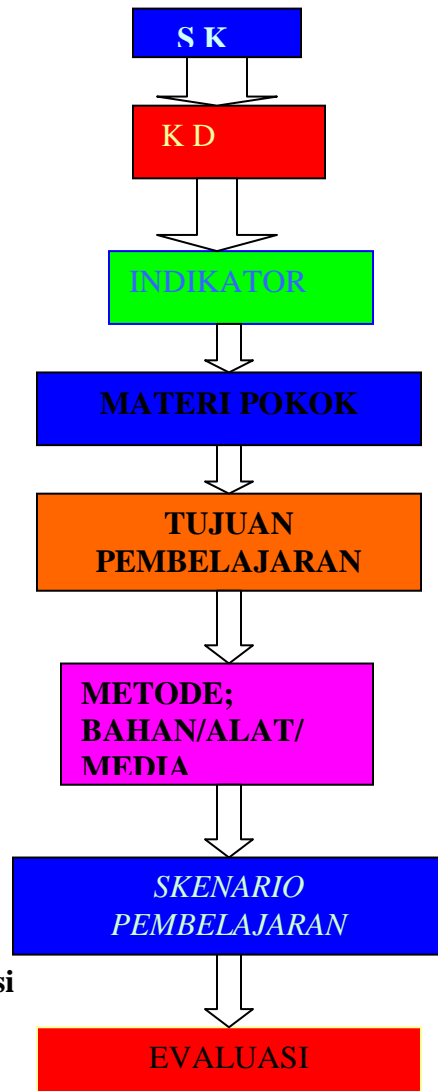
Rambu-rambu utama agar RPP tidak menyimpang adalah SK dan KD yang ada dalam kurikulum nasional, keduanya tidak boleh diganti atau dirubah. SK dan KD berlaku secara nasional, sedangkan komponen lain dari RPP dapat dan memang harus dikembangkan oleh guru sesuai dengan keadaan siswa, sekolah atau daerahnya. Itu berarti satu RPP dapat memuat satu atau lebih indikator, dan dapat disajikan dalam satu atau lebih pertemuan/tatap muka di kelas.

Secara ringkas komponen dan model RPP, dapat kita lihat pada skema berikut ini:

### **b. Langkah-langkah menyusun RPP**

- 1) Mengisi kolom identitas;
- 2) Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan SK, KD, dan Indikator yang akan digunakan (terdapat pada silabus yang telah disusun).
- 4) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD dan Indikator yang telah ditentukan.
- 5) Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok/pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok/pembelajaran.
- 6) Mementukan metode pembelajaran yang akan digunakan.
- 7) Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir.
- 8) Menentukan alat/bahan/sumber belajar hyang digunakan.
- 9) Menyusun kriteria penilaian, lemabar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dll.

## 2. Komponen :



### 2.1. Komponen RPP

#### a) Standar Kompetensi

Di dalam kurikulum versi 2006 (KTSP) terdapat konsep kompetensi dasar. Yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Adapun kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus, memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dalam KTSP ada Standar Kompetensi (SK) yaitu kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, kelompok mata pelajaran, atau mata pelajaran tertentu

Rumusan Standar Kompetensi (SK) dapat disusun atas dasar nama-nama ranah pendidikan, meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, setiap kegiatan pembelajaran (mata pelajaran apa pun) memiliki standar kompetensi yang sama, yaitu perkembangannya pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Model perumusan SK-nya, misalnya :

- (1) Memiliki pengetahuan tentang teknik berwawancara;
- (2) Memiliki keterampilan melakukan wawancara dengan nara sumber;
- (3) Memiliki sikap santun ketika melakukan wawancara dengan nara sumber.

Karena KTSP di samping berdasarkan SK Lulusan juga berdasar pada Standar Isi, masing-masing rumusan SK di atas dapat dikembangkan sesuai dengan isi yang harus dipelajari oleh peserta didik, misalnya menulis kembali informasi yang didengar, menangkap isi tersirat bacaan, dsb.

#### **b) Rumusan Kompetensi Dasar [KD]**

**Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu.** Seperti halnya SK, maka KD yang ada dalam KBK masih dipakai dalam KTSP.

KBK memang sudah merumuskan KD, namun rumusan satu dengan rumusan yang lain tidak selalu jelas acuannya sehingga jika terdapat KD yang belum dirumuskan, guru akan kesulitan menambah rumusan KD baru. Oleh karena itu, penataan KTSP dalam merumuskan KD (agar mudah diikuti oleh guru) menggunakan kategori-kategori dalam setiap ranah pendidikan yang operasional.

#### **c). Perumusan Indikator**

Selaras dengan rumusan KD, setiap kategori dalam ranah pendidikan dapat dicapai melalui kegiatan konkret yang dapat diukur dan diamati. Oleh karena itu, perumusan indikator hendaknya disusun menggunakan kata kerja operasional dalam setiap kategori dalam domain pendidikan, maksudnya kata kerja itu dapat dengan mudah diverifikasi, diukur, diamati, dll.

**Indikator adalah penanda pencapaian KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur atau diamati yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini dapat berupa kegiatan yang lebih spesifik, atau perbuatan, respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kompetensi dasar tertentu.** Indikator dalam KTSP harus dirumuskan sendiri oleh guru.

Untuk merumuskan penanda tercapainya suatu KD tidak ada pegangan secara pasti. Namun, dengan menggunakan penalaran secara logis, setiap orang dapat mendeskripsikan penanda-penanda yang memungkinkan untuk mewujudkan KD melalui kata kuncinya..

Kata-kata yang menunjukkan aktivitas dalam indikator diasumsikan merupakan serangkaian aktivitas yang dapat diukur atau diamati. Jika aktivitas itu secara keseluruhan sudah dilakukan dengan benar, KD yang dimaksud berarti sudah tercapai. Oleh karena itu, semakin lengkap aktivitas yang dilakukan diharapkan semakin jelas ketercapaian KD yang dimaksud. Namun, harus disadari bahwa banyaknya aktivitas sebagai indikator harus memperhitungkan alokasi waktu yang tersedia, luasnya cakupan materi yang harus dipelajari agar seluruh KD dapat tercapai. Tercapainya keseluruhan KD merupakan pertanda tercapainya Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SKMP).

Jika dilihat dari rambu-rambu KTSP, SKMP merupakan standar yang harus dicapai. Sementara itu, KD yang ada dalam KTSP merupakan kriteria minimal yang harus dicapai oleh mata pelajaran itu.

#### **d) Materi Pokok**

Dalam kurikulum 1994 materi menjadi orientasi pokok pencapaian hasil belajar, tetapi dalam KTSP orientasi pokok peserta didik adalah penguasaan KD, oleh sebab itu peran materi adalah mendukung tercapainya KD dalam pembelajaran. Dalam KTSP ada dua istilah penting yang berkaitan dengan materi ajar, yaitu materi pokok dan materi pembelajaran. Materi pokok dapat juga disebut pokok bahasan dan subpokok bahasan dari suatu kompetensi dasar. Materi pembelajaran adalah bahan ajar minimal yang harus dipelajari peserta didik untuk menguasai

kompetensi dasar. SK dan KD merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

Salah satu cara paling mudah menentukan materi dalam RPP adalah dengan mengidentifikasi unsur pokok dalam KD, yaitu dengan menghilangkan kata kerjanya.

Misal, KD : "Mengidentifikasi norma (hukum, moral, sopan santun) dan nilai-nilai serta pelaksanaannya dalam masyarakat".

Materi pokoknya adalah " norma (hukum, moral, sopan santun) dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat".

Kemudian materi pokok dikembangkan dengan 1) mencari buku referensi; 2) mencari fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Kriteria materi pembelajaran yang baik adalah:

- a) terpercaya, artinya benar dan aktual;
- b) relevan, artinya memang diperlukan untuk dipelajari,
- c) bermanfaat untuk mengembangkan kecakapan hidup (*life skill*) dan sikap hidup,
- d) layak dipelajari (baik tingkat kesulitannya terpenuhi maupun manfaatnya untuk kondisi setempat).
- e) Menarik bagi siswa, artinya menimbulkan motivasi untuk mempelajari lebih lanjut.

Sangat baik jika materi disampaikan, atau digali sendiri oleh peserta didik lebih dahulu agar nantinya sudah ada dasar berpijak untuk mendukung yang akan disampaikan oleh guru. Luas, dalam cakupan materi pokok tergantung dari KD dan Indikator yang dirumuskan. Jika KD dan Indikator ternyata memerlukan kedalaman dan keluasan cakupan materi yang dalam dan luas maka pendidik memang perlu mencampainya pada peserta didik.

Materi pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Materi yang didasarkan atau berasal dari hukum/teori/pendakat yang sudah mapan (*given*). Contohnya misalnya: norma moral lebih mendasar daripada norma hukum; norma hukum berlaku objektif; norma sosial berlaku relatif; HAM bersifat universal dll.
- b) Materi yang didasarkan atas teori yang berkembang dalam masyarakat, tetapi belum mapan menjadi acuan umum. Misalnya, teori pembuktian terbalik dalam ilmu hukum; ekonomi Pancasila, dll.

c) Materi yang didasarkan atas fenomena aktual yang muncul atau terjadi dalam masyarakat dan bersifat insidental. Misalnya: jatuh dan hilangnya pesawat atau kapal di "Segi tiga Pemuda" di perairan Cuba-Florida; lumpur Lampindo di Sidoarjo, dll.

Namun tidak setiap materi mata pelajaran dengan mudah dicarikan contoh atau dapat dibagi atau dikelompokkan dalam tiga kriteria tersebut di atas.

#### **e) Tujuan pembelajaran**

Tujuan pembelajaran akan menjadi pengalaman belajar. Tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang harus dicapai siswa sehingga mencapai KD. Maka tujuan pembelajaran merupakan rincian lebih lanjut indikator-indikator yang menjabarkan KD. Ada beberapa hal penting yang harus diungkapkan dalam tujuan pembelajaran dan akan menjadi pengalaman belajar, yaitu:

- 1) apa yang dilakukan oleh siswa (kegiatan belajar) harus jelas;
- 2) jalan manakah yang dilalui oleh siswa untuk mencapai kompetensi dasar (metode pembelajaran), dan
- 3) adakah jembatan yang diperlukan oleh siswa untuk melewati jalan tersebut guna mencapai kompetensi dasar (media pembelajaran).

Pengalaman belajar ini berkaitan apa yang dilakukan, dirasakan, dialami selama proses pembelajaran (bidang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai) harus dapat diukur dan konkret.

#### **f) Sumber / alat pembelajaran**

Sumber belajar adalah asal materi pembelajaran diambil dan digunakan oleh guru untuk mendukung tercapainya KD dan Indikator yang telah ditentukan. Sumber belajar itu dapat dalam bentuk bahan cetakan seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dapat sumber elektronik seperti dari radio, TV, internet, dll.

Alat pembelajaran adalah perlengkapan yang digunakan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas, misalnya OHP, peta, komputer, laptop, viewer, dll.

#### **g) Skenario Pembelajaran**

Skenario pembelajaran adalah rancangan aktivitas belajar yang dibuat oleh guru untuk mencapai KD tertentu sesuai dengan silabus yang telah dibuat oleh guru. Skenario pembelajaran ini perlu persiapan sbb:

(a) Memperhatikan (terkait dengan pendekatan: asumsi-asumsi dasar):

- (1) kondisi konkret hidup (keluarga) para peserta didik;

- (2) SDM, sarana-prasarana sekolah;
  - (3) keadaan konkret masyarakat;
  - (4) kemampuan akademis peserta didik;
  - (5) kondisi fisik, psikis, mental peserta didik
  - (6) kesediaan waktu tatap muka dan kalender pendidikan,
  - (7) metode pembelajaran dan pendekatan mata pelajaran yang akan digunakan;
  - (8) jenis, bentuk evaluasi yang akan digunakan.
- (b) Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh di luar kelas dan di dalam kelas, atau hanya di dalam kelas saja, secara detail dan jelas.
- (c) Guru merancang kegiatan pembelajaran secara rinci dan detail:
- (1) jenis kegiatan; (2) lama kegiatan;
  - (3) peserta kegiatan; (4) jadwal kegiatan;
  - (5) petunjuk kegiatan; (6) rincian tugas/pekerjaan yang harus dikerjakan peserta didik;
  - (7) pengorganisasian tugas ;(8) bentuk laporan kegiatan
- (8) Kegiatan pembelajaran di kelas terdiri dari:**
- a. apersepsi (berapa menit)
  - b. kegiatan inti (berapa menit)
  - c. penutup (berapa menit)
  - d. uraian materi oleh guru sebagai penguatan (berapa menit)

**(e). Penilaian**

Dengan memperhatikan KD, Indikator, proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, guru membuat penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik sejauh mana siswa telah menguasai KD ( bukan materi seperti dalam kurikulum 1994). Bentuk, jenis, instrumen penilaian sangat tergantung dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

**(f). Analisis hasil belajar**

Setelah guru mengadakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik, sebaiknya guru menganalisis hasilnya: sejauh mana tingkat keberhasilan penguasaan KD yang telah dibahas. Bagi siswa yang belum mencapai tingkat ketuntasan pencapaian hasil belajar, perlu dirancang adanya remedi lebih lanjut.

**2.2.Model RPP**



Model RPP pada dasarnya ada tiga, yaitu: model matrik; model format dan gabungan dari keduanya. Model mana yang akan dipilih tergantung dari kesepakatan sekolah, atau daerah tertentu.

#### a. Model matrik

Nama sekolah : SMA Indonesia Modern

Mata pelajaran : PKn

Kelas : X

Semester : 2

Waktu : 3 tatap muka ( 3 x 45 menit)

Pendekatan : SAL, *cooperative learning*

Metode belajar : studi pustaka, diskusi kelompok, presentasi

S.K.: Kemampuan membiasakan , menyampaikn dan menggunakan informasi tentang prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan, nilai, norma serta implikasinya dalam berbangsa dan bernegara

Tatap Muka	KD	Indikator	Materi pokok	Pengalaman Belajar	Penilaian		Sumber belajar
					<i>Jenis tagihan [ tes atau non tes ]</i>	<i>Bentuk tagihan Instrumen tagihan</i>	Magnis Suseno, 1987. <i>Etika Politik Prinsip-prinsip DasarK engaraa n; UUD 1945 setelah diaman demen, 1999.</i>
1	Kemampuan menjelaskan, membandingka	1.Menjelaskan berdasarkan berbagai sumber bahan ajar:	Pengertian demokrasi, macam-macam sistem pemerintahan demokratis	1.Secara berkelompok siswa melakukan studi kelompok	1. Non tes /Kinerja 2. Tes	1.Laporan tertulis kelompok Esei	

	<p>n dan menganalisis prinsip-prinsip demokrasi, sistem pemerintahan yang demokratis dan implementasinya dalam pemerintahan RI menurut UUD 1945</p>	<p>pengertian, prinsip dan sistem pemerintahan yang demokratis.  2.Membandingkan sistem pemerintahan demokratis dari berbagai negara.  3.Membandingkan dan menganalisis sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 setelah dan sebelum diamandemen.</p>	<p>dan penjabarannya dalam sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 sebelum dan setelah diamandemen</p>	<p>tentang: pengertian, prinsip demokrasi dan sistem pemerintahan yang demokratis  2. Secara berkelompok siswa dapat membandingkan sistem pemerintahan demokratis di berbagai negara.  3.Secara berkelompok siswa membandingkan dan menganalisis sistem pemerintahan RI sebelum dan setelah diamandemen  4.Setiap kelompok mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerjanya.</p>			
--	---	--	--	---	--	--	--

## **b. Model format**

- Nama sekolah : .. .....
- Mata Pelajaran : .....
- Kelas : .....
- Semester : .....
- Waktu : .....
- Pendekatan/Metode : .....
- A. Standar Kompetensi : .....
- B. Kompetensi Dasar : .....
- C. Materi pokok : .....
- D. Indikator : .....
- E. Pengalaman belajar : .....
- F. Sumber/bahan/alat pembelajaran: .....
- G. Skenario pembelajaran:
- a. apersepsi ( berapa menit)
  - b. kegiatan inti (berapa menit)
  - c. pendalaman materi oleh guru (berapa menit)
  - d. penutup (berapa menit)
- H. Penilaian
- I. Analisis hasil belajar dan program tindak lanjut.

### **Contoh model format**

- Nama Sekolah : SMA Indonesia Modern
- Mata Pelajaran : PKn
- Kelas/Semester : X/2
- Waktu : 4 X 45 ( dua kali pertemuan a 2 x 45)
- Pendekatan : SAL dan Berbasis Kerja kelompok
- Metode : Studi pustaka, observasi, presentasi dan diskusi

#### **1. Standar Kompetensi**

Kemampuan membiasakan untuk mencari, menyerap, menyampaikan dan menggunakan informasi tentang hakekat bangsa dan negara; nilai, norma, prinsip-prinsip demokrasi serta implikasinya dalam berbangsa dan bernegara.

#### **2. Kompetensi Dasar**

Kemampuan mengekspresikan dan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi.

### 3. Indikator

1. Mendefinisikan makna demokrasi;
2. Menjelaskan macam-macam sistem pemerintahan yang demokratis,
3. Membandingkan berbagai sistem pemerintahan di dunia;
4. Mendeskripsikan sistem pemerintahan RI sebelum dan setelah amandemen UUD 1945.

### 4. Tujuan pembelajaran [ pengalaman belajar]

Siswa dapat:

1. mendefinisikan makna demokrasi;
2. menjelaskan macam-macam sistem pemerintahan yang demokratis,
3. membandingkan berbagai sistem pemerintahan di dunia;
4. mendeskripsikan sistem pemerintahan RI sebelum dan setelah amandemen UUD 1945

### 5. Materi

Materi pokok:

Prinsip-prinsip demokrasi

Uraian materi pokok:

Pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi dan penjabaran dalam berbagai sistem pemerintahan yang demokratis

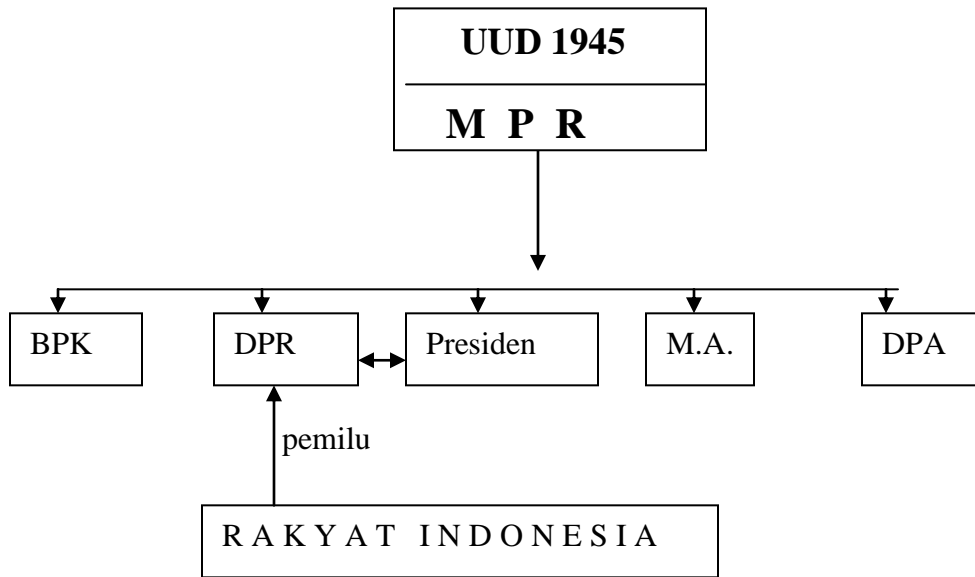
### 6. Sumber/Alat Pembelajaran

#### 1. Sumber

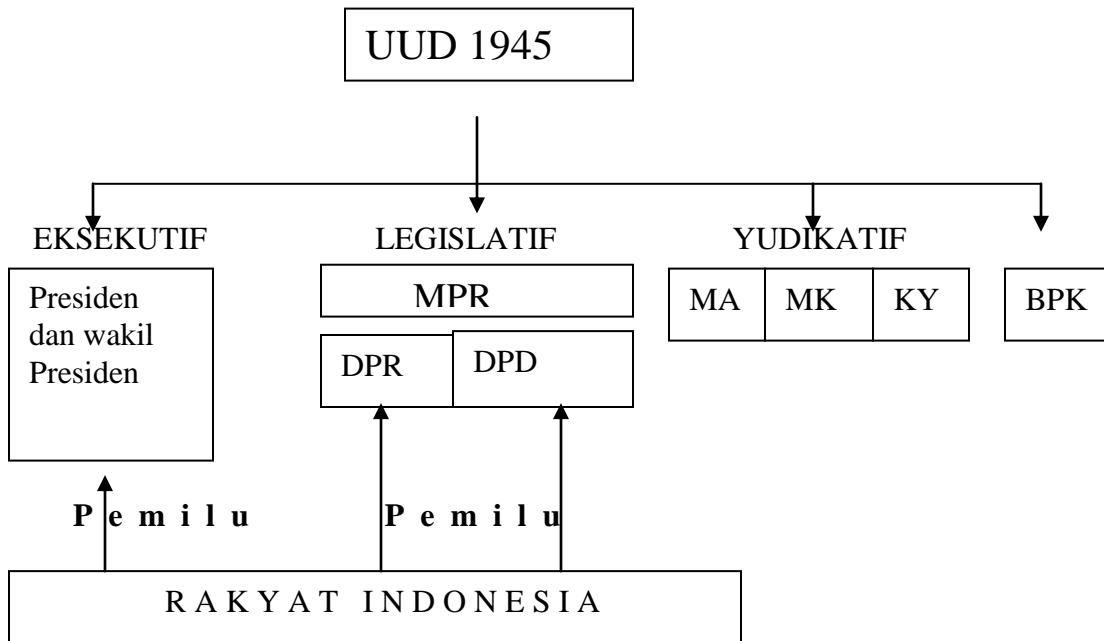
- a. Magnis Suseno.1987.*Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT.Gramedia, Jakarta.
- b. Rousseau, J.J.1986.*Kontrak Sosial*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- c. John Locke.1980 (1690).*Second Tratisse of Government*,Indiapolis, Cambridge.
- d. Miram Budihardjo.1987. *Demokaris dan Sosialisme Demokrat*,PT Gramedia, Jakarta.
- e.-----1981.*Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai*,PT Gramedia, Jakarta.
- f. UUD 1945, setelah diamandemen 2002.
- g. Hermann Kinder, Cs.1978.*Atlas of World History, vol2*,Penguin Books,New York

#### 2. Alat/media: OHP; gambar sistem pemerintahan (transparasi)

**Struktur Pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 *Sebelum diamandemen***



***Sesudah diamandemen***

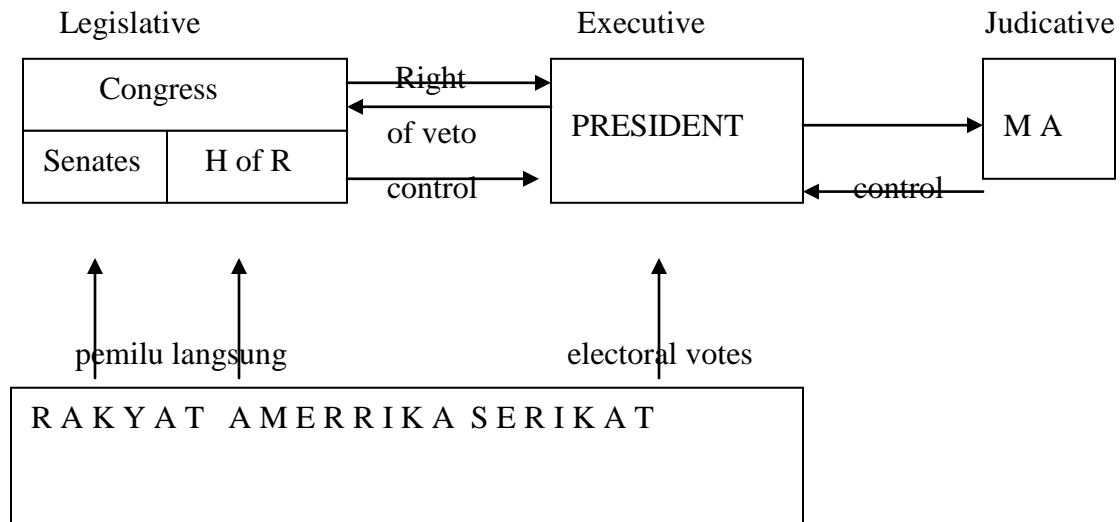


MK : Mahkamah Konstitusi

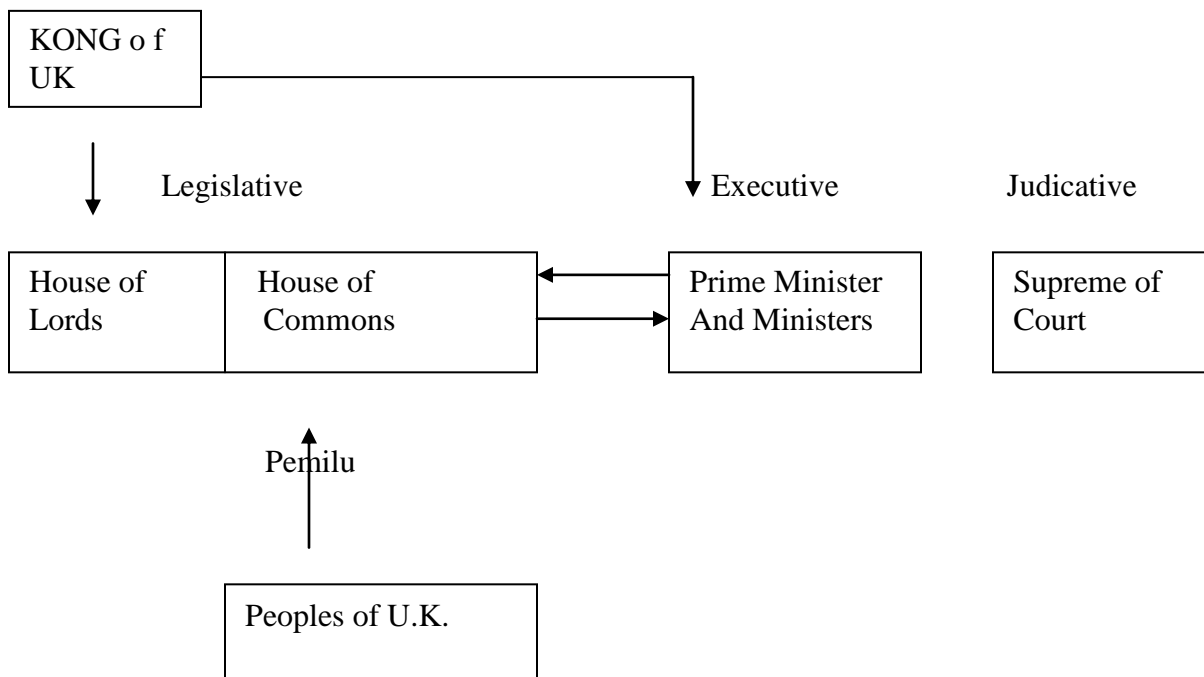
MA : Mahkamah Agung

KY : Komisi Yudisial

**Sistem Presidensiil USA**



**Sistem parlementer United Kingdom**



## 6. Skenario/langkah Pembelajaran

Kita lakukan dua tahapan dalam skenario pengalaman belajar siswa:

### 1. Di luar kelas

- a. Pengalaman belajar siswa melalui studi pustaka (buku, koran, majalah) sehubungan ( a) soal demokrasi, (b) soal pemilu yang terkait dengan kampanye dan pelaksanaan pemilu anggota legislatif 4 April 2009 dan pemilu presiden dan wakilnya, 8 Juli 2009, (c) sistem pemerintahan menurut UUD 1945, sistem pemerintahan di USA dan di Inggris.
- b. Sebelum siswa melakukan tugas, guru membagi kelompok antara lain: (1) kelompok kampanye dan pelaksanaan pemilu legislatif 4 April 2009 dan pemilu presiden 8 Juli 2009; (2) kelompok sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum dan setelah diamandemen; (3) kelompok sistem pemerintahan USA; dan sistem pemerintahan Inggris.

Tugas siswa dalam bentuk Lembar kerja, di antaranya berisikan:

(1) a. Judul laporan: Pemilu legislatif 4 April 2009 dan pemilu Presiden 8 Juli 2009.

b. Isi laporan singkat:

- pengertian demokrasi, pemilu, sistem distrik, sistem proposional;
- partai politik peserta pemilu; sistem multi partai.
- kampanye pemilu; waktu, cara kampanye, dll.
- pelaksanaan pemilu; dan
- hasil pemilu legislatif (boleh tingkat kabupaten atau tingkat propinsi atau pusat)

c. Identifikasi fakta-fakta kampanye, fakta pemungutan suara dan prosesnya; fakta peroleh suara partai politik.

d. Deskripsi pesan-pesan dalam pemilu yang luber, norma-norma, nilai-nilai dasar demokrasi.

e. Kesimpulan:

Rekonstruksi tentang sistem demokrasi Pancasila di Indonesia dan pemilu yang luber dan jurdil.

(2) a. Judul laporan: Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 sebelum dan setelah di amandemen.

b. Isi laporan singkat:

Membandingkan sistem pemerintahan RI sebelum dan setelah UUD 1945 di amandemen:

- Lembaga-lembaga tinggi/tertinggi negara beserta pasal-pasal yang mengaturnya.
- Kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga tinggi / tertinggi negara.
- Hubungan antar lembaga tinggi / tertinggi negara.
- Mekanisme kerja lembaga tinggi / tertinggi negara.
- Mekanisme pemilihan para anggota lembaga tinggi / tertinggi negara.

c. Identifikasi pasal-pasal dan lembaga-lembaga tinggi/ tertinggi negara RI sebelum dan setelah UUD 1945 diamandemen.

d. Mendeskripsi ciri khas sistem pemerintahan RI dan sistem demokrasi RI.

e. Kesimpulan :

Demokrasi bersifat dinamis, RI setelah UUD 1945 diamandemen lebih demokratis.

(3) a. Judul laporan: Sistem pemerintahan USA dan sistem pemerintahan Inggris

b. Isi laporan singkat:

- Lembaga-lembaga kenegaraan di USA dan di Inggris persamaan dan perbedaannya.
- Kekuasaan dan tugas lembaga-lembaga pemerintahan di USA dan di Inggris.
- Hubungan kerja antara lembaga-lembaga negara tersebut ( sama dan bedanya)
- Mekanisme kerja lembaga-lembaga negara tersebut.( sama dan bedanya)
- Mekanisme pemilihan atau penetapan anggota lembaga-lembaga tersebut (sama dan bedanya)

c. Identifikasi lembaga-lembaga kenegaraan di UAS dan Inggris (sama dan bedanya)

d. Deskripsi nilai-nilai, norma-norma dan falsafah dasar demokrasi di USA dan di Inggris.

e. Kesimpulan:

Sistem di USA adalah presidensiil dan sistem di Inggris adalah parlemeneter, sama-sama demokrasi tetapi sistemnya yang berbeda.

## **2. Di kelas**

a. Apersepsi ( 15 menit)

- Guru membuka pembelajaran dengan menanyakan kesiapan tugas yang akan didiskusikan?  
Siswa menjawab sudah siap.
- Guru menanyakan secara singkat proses penyusunan laporan dari masing-masing kelompok  
? Dan setiap kelompok memberi penjelasan proses penyusunan laporan kelompok.



b. Kegiatan inti ( 2 x 75 menit)

Mempresentasikan hasil laporan kelompok secara bergantian mulai dari kelompok (1), (2) dan (3), dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Dalam diskusi kelas siswa mempresentasikan hasil laporannya dengan kemampuan yang didapatkan dari kajian pustaka, keterlibatan, observasi, pengamatan lapangan, wawancara dengan nara sumber bila dimungkinkan.

Dalam diskusi kelompok akan nampak terlihat kemampuan siswa dalam mempertahankan pendapatnya dengan argumentasinya, menghormati pendapat teman, dan merumuskan hipotesis atau pemikirannya.

Setelah presentasi semua kelompok dengan disertai diskusi dan tanya jawab, guru memaparkan materi ajar untuk melengkapi, menyempurnakan, mengklarifikasi dan memperkuat hasil laporan semua kelompok. Cara penyampaian dapat dengan ceramah, membagikan bahan ajar untuk dibaca secara individual atau kelompok lalu tanya jawab, diskusi dan peneguhan oleh guru.

c. Penutup ( 15 menit)

Kesimpulan yang dilakukan oleh guru sebagai moderator dan fasilitator dengan menyatakan bukan satu-satunya kebenaran.

- .1). Pengertian tentang demokrasi, sistem presidensiil, sistem parlementer, sistem distrik dan sistem proposional.
  - Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat ( Rousseau)
  - Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan, di mana Presiden berfungsi sekaligus sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, tidak bertanggungjawab dan tidak tergantung kepada Parlemen, tetapi bertanggungjawab dan tergantung kepada rakyat.
  - Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan, di mana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan tergantung dan bertanggungjawab kepada Parlemen, sedangkan kepala negara dipegang oleh lembaga / orang lain.
  - Sistem distrik adalah sistem pemilihan umum, di mana wakil rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah pemilihan tertentu.

- Sistem proposional adalah sistem pemilihan umum di mana rakyat memilih partai politik tertentu, dan partai politiklah yang menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di Parlemen.
- 2). Identifikasi fakta, bahwa ada berbagai macam sistem pemerintahan yang bersifat demokratis seperti di Amerika Serikat, di Inggris dan juga di negara kita, tetapi pelaksanaannya berbeda karena tergantung pada berbagai faktor yang tidak sama. Pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari norma hukum, sistem nilai yang dianut oleh suatu bangsa.
- 3) Kesimpulan: demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjamin kepentingan seluruh rakyat, kendati dalam pelaksanaannya dapat bervariasi.

### **Uraian materi**

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan mempunyai sejarah yang panjang. Dimulai di Eropa ketika pemerintahan monarkhi absolut merajalela maka muncul gagasan dari para pemikir politik untuk merombak sistem otoriter itu menjadi sistem yang demokratis. John Locke (1632-1704) seorang ahli filsafat politik Inggris boleh disebut sebagai pemikir pertama tentang pentingnya negara yang demokratis. Alasannya negara itu merupakan hasil kontrak [kesepakatan] bersama seluruh rakyat. Kekuasaan negara berasal dari rakyat oleh karena itu rakyatlah yang harus mengatur negara. Agar penguasa negara tidak bertindak sewenang-wenang maka John Locke mengajukan beberapa pedoman untuk mencegah penguasa tidak diktatur. Pertama, kekuasaan harus dibagi tiga (trias politika John Locke: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan federatif). Kedua, pemegang kekuasaan adalah orang-orang yang harus dipilih oleh rakyat lewat pemilihan bebas, agar mewakili kepentingan rakyat. Ketiga, wakil-wakil rakyat dihimpun dalam wadah yang disebut 'parlemen' [ 'parle' (Prancis): berarti bicara, maka parlemen adalah kelompok orang-orang yang pandai berbicara.]. Keempat, negara harus menjamin hak azasi manusia ( hak hidup, hak milik, hak bicara dan hak bepergian).

Gagasan John Locke disempurnakan oleh gagasan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dari Perancis, yang terkenal dengan gagasannya bahwa negara merupakan kontrak sosial seluruh rakyat. Negara harus diatur secara demokratis, karena negara itu berasal dari rakyat, diperintah oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Rakyatlah pemilik negara, maka seluruh pejabat negara harus dipilih langsung oleh rakyat, diawasi oleh rakyat dan diberhentikan oleh rakyat. Maka semua pejabat negara adalah abdi rakyat, dalam arti para pejabat harus mengabdikan kepentingan rakyat, dan sepenuhnya mereka tergantung kepada rakyat.

Pemikiran John Locke, Rousseau dilengkapai oleh Montesquieu (1689-1755) dari Perancis yang mengusulkan suatu negara hanya demokratis kalau sekaligus negara hukum ( berdasarkan norma hukum, bukan norma moral/agama dan bukan norma sosial). Hukum positif (tertulis) adalah bentuk konkret kesepakatan antara rakyat dan negara/pemerintah. Hukum yang baik adalah ketentuan yang menjamin hak, kepentingan rakyat ; mengatur penggunaan kekuasaan negara/pemerintah dan meminimalkan penggunaan kekuasaan atas rakyat. Montesquieu juga menjadi terkenal dengan gagasannya tentang *trias politica*, yaitu perlunya pembagian kekuasaan negara menjadi tiga lembaga kekuasaan: lembaga legislatif (lembaga negara yang berfungsi membuat berbagai ketentuan hukum); lembaga eksekutif (lembaga negara yang menjalankan pemerintahan sehari-hari) ;dan lembaga yudikatif (lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hukum oleh rakyat dan lembaga-lembaga kenegaraan).

Dalam perkembangannya gagasan tentang negara hukum terus disempurnakan oleh para ahli hukum seperti Savigny dari Jerman, yang intinya menetapkan bahwa suatu negara hukum harus menegakkan seperangkat nilai-nilai dasar demokrasi, yaitu nilai: (1) kesamaan (*equality*) bagi setiap orang; (2) kebebasan ( *freedom*) bagi setiap orang; (3) kepentingan umum ( *bonum publicum*) ; (4) solidaritas (*solidarity*) antar setiap orang. Kemudian John Schwarmantel (1984) menyebutkan tiga ciri utama sebuah negara yang demokratis adalah: pertama, *participation*: negara menjamin setiap warganegaranya untuk ikut serta dalam pengelolaan negara; kedua, *equality*: negara menjamin perlakuan yang sama bagi setiap warganegara (tidak ada diskriminasi dengan dalih apapun); ketiga, *accotability*: pemerintah wajib memberi pertanggungjawaban atas segala kebijakan dan tindakannya terhadap rakyatnya.

Prinsip-prinsip dasar demokrasi di atas dijabarkan dalam struktur pemerintahan secara bertahap, mulai di Inggris sejak revolusi agung (1669) yang menjadi cikal bakal sistem pemerintahan parlementer; di Amerika sejak berdiri menjadi negara merdeka (1776) yang melahirkan sistem pemerintahan presidensiil, serta di Perancis (1789) yang kemudian melahirkan gabungan sistem parlementer dan sistem presidensiil, serta di Republik Indonesia yang melahirkan sistem demokrasi Pancasila.

Sistem Parlementer. Dalam sistem ini para anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau atas nama pribadi. Pemenang pemilu berhak membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri (PM). PM membentuk pemerintahan (kabinet) yang para menterinya diambil dari anggota Parlemen dari partainya atau

partai koalisinya. PM atau para menteri secara individual atau kolektif bertanggungjawab kepada Parlemen. Maka kedudukan pemerintah tergantung dari penguasaan anggota Parlemen. Jika terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan antara Pemerintah dan Parlemen, maka Parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah. Jika mosi tidak percaya didukung oleh mayoritas anggota Parlemen maka Pemerintah jatuh dan diadakan pemilu yang baru atau kabinet dirombak untuk mendapatkan dukungan mayoritas anggota Parlemen.

**Sistem Presidensiil.** Dalam sistem ini anggota Parlemen dan Presiden beserta wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil Presiden terpilih membentuk kabinet. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden (bukan kepada Parlemen). Presiden dan Parlemen kedudukannya sama, tidak dapat saling menjatuhkan tetapi ada sarana untuk saling mengontrol kekuasaannya secara seimbang. Presiden dan para anggota Parlemen bertanggungjawab kepada rakyat lewat pemilihan umum yang diadakans ecafra periodik.

**Demokrasi Pancasila.** Sistem di Idonesia yang sering dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen, pada dasarnya menandung nilai-nilai demokrasi yang sama dengan demokrasi Barat, tetapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Maka struktur pemerintahannya pada dasarnya mengkombinasikan sistem presidensiil USA dan sistem Parlemerter Inggris dengan ditambah kekhususan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen maka sistem pemerintahan Indonesia lebih mirip dengan sistem Presidensiil USA.

## **7. Penilaian**

### **a. Jenis tes; bentuk: esei**

#### **Bentuk instrumen sbb:**

1. Penilaian kognitif, guru dapat melakukan post-tes dengan membuat pertanyaan yang tidak mengulang pengalaman belajar.

Tes uraian bebas ( buka buku)

- a. Bandingkan sistem pemerintahan RI berdasarkan UUD 1945 sebelum dan setelah diamandemen? Mana yang lebih demokratis?
- b. Uraikan secara sistematis, nilai-nilai dasar apa saja yang terkandung dalam sistem pemerintahan RI berdasakan UUD 1945 setelah diamandemen?
- c. Bandingkan sistem pemerintahan mana yang lebih demokratis antara sistem USD, sistem Inggris dan sistem RI? Berilah alasannya?

Untuk memudahkan penskoran, maka dibuat rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan acuan. Contoh untuk ketiga soal di atas, disediakan rambu-rambu sebagai berikut:

Pedoman penilaian uraian bebas

No	Kriteria jawaban	Skor
01	Pejabat lembaga negara mana saja yang dipilih langsung oleh rakyat	1
02	Bagaimana pembagian kekuasaan negara agar tidak absolut	1
03	Bagaimana mekanisme kerja antar lembaga negara	2
04	Nilai-nilai demokrasi apa saja yang terkandung dalam sistem tersebut	1
	Skor maksimal	5

## 2. Jenis: nontes; bentuk: untuk kerja

Penilaian afektif. Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan individual, yang dilakukan oleh guru, selama proses pembelajaran berlangsung, baik berupa ‘komentar’, atau dalam bentuk pengamatan.

Format lembar pengamatan sikap siswa (penilaian afektif)

No	Indikator Sikap	Kerjasama	Pembagian tugas	Tanggung jawab	Tanggung rasa	Penguasaamateri	Mutu presentasi	Nilai rata-rata
	Nama siswa							
01								
02								
03								
04								

Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Akan tetapi, pada tahap akhir skor tersebut dirata-ratakan dan dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif. Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s/d 5. penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 1 = sangat kurang; 2= kurang; 3=cukup; 4=baik; dan 5 = sangat baik.

## 3. Penilaian portofolio

Berupa laporan kerja kelompok

## **Daftar Pustaka**

Nasution, S. (1989). *Kurikulum dan pengajaran*. Jakarta: Bina Aksara

Nana Sudjana. (1988). *Pembinaan dan pengembangan kurikulum di sekolah*. Bandung: Sinar Baru

KBK.(2002). *Kurikulum hasil belajar*. Jakarta: Depdiknas

KBK. (2002). *Pengembangan silabus*. Jakarta: Depdiknas

Mardapi, Djemari. (2003). *Strategi penilaian berbasis kompetensi*. UNY

PP no 20 tahun 2005 (Depdiknas)